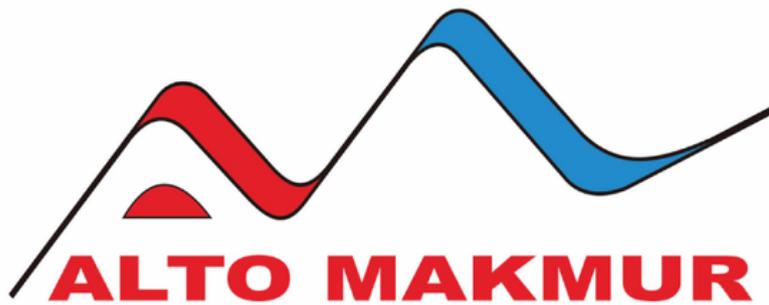


**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ALTO MAKMUR
TAHUN 2024**

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT



**Jl.Padjadjaran (Ringroad Utara), Maguwoharjo, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55282, Indonesia
TELEPON: (0274) 487658**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR ALTO MAKMUR
Alamat	Jl Padjadjaran (Ringroad Utara) Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
Nomor Telepon	(0274) 487658

Penjelasan Umum:

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum, maka Manajemen BPR Alto Makmur telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola BPR atau GCG yang meliputi 5 pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (resposibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness). Dengan komitmen penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan disemua lini perusahaan merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis untuk mendukung pengelolaan operasional usaha BPR Alto Makmur dapat senantiasa tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, berdayasaing tinggi serta berkelanjutan. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen dan konsistensi Manajemen BPR Alto Makmur dalam penerapan tata kelola, akan mampu menjauhkan Bank dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank. BPR Alto Makmur berkomitmen untuk menerapkan dan senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa kini maupun masa yang akan datang. Komitmen ini tentu didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan BPR Alto Makmur. Seluruh insan BPR Alto Makmur meyakini bahwa Konsistensi dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah dibuat menjadi kunci untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik di lingkungan PT. BPR Alto Makmur. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan konsumen/masyarakat agar PT. BPR Alto Makmur memiliki daya saing yang kuat dan mampu menjaga kesehatan serta keberlangsungan usaha

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

BPR Alto Makmur secara umum telah menerapkan pelaksanaan tata kelola BPR dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Kusmintarjo Yatendro
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab akan terselenggaranya kegiatan bisnis dan operasional Bank sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku Wajib dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan operasional Bank secara menyeluruh, sehat, berkesinambungan, efektif dan efisien. Bersama Direksi dan staff menyusun rencana bisnis dan anggaran perusahaan sekaligus merealisasikan pencapaian target kinerja keuangan Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis BPR. Menyusun dan menetapkan kebijakan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) bersama- sama anggota Direksi dan staff yang terkait dari masing- masing bidang kegiatan secara fleksibel, efektif dan efisien. Menetapkan kebijakan umum perusahaan sebagai acuan dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank. Mengelola kekayaan dan hutang Bank dengan sebaik- baiknya sesuai yang tercantum di Anggaran Dasar Perseroan serta menjaga tingkat kesehatan Bank agar selalu dalam kondisi sehat, dengan memperhatikan kepentingan nasabah, pemilik dan karyawan. Memberi laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bank baik kepada Pemegang Saham maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bersama- sama dengan anggota Direksi lain dibantu oleh PE Audit Intern melakukan pengawasan secara menyeluruh atas kegiatan operasional BPR Alto Makmur sesuai dengan sistem dan prosedur serta tujuan Bank. Memantau dan mengevaluasi performace Bank secara keseluruhan. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Mengungkap kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai Bertanggung jawab atas penerapan kebijakan APU- PPT sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab akan terpeliharanya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank. 		
2.	Nama	Jupaidi
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank, Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Secara berkala melakukan review dan evaluasi pedoman kebijakan dan prosedur sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku kini. 		

3. Membentuk paling sedikit satuan kerja/ pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi sebagai audit intern, manajemen risiko; kepatuhan, perlindungan Konsumen, APU-PPT & PPPSPM serta fungsi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Memastikan dan menganalisa kinerja perusahaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dan memberikan masukan kepada Direktur Utama untuk mengambil langkah antisipasi yang diperlukan.
6. Memastikan dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
7. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau temuan audit PE fungsi audit intern, Ekstern (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris maupun hasil Pengawasan OJK dan/atau lembaga otoritas lain.
8. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
9. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
10. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris serta Otoritas Jasa Keuangan.
11. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR Alto Makmur dalam mencapai maksud dan tujuannya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah mengikutsertakan pegawai (SDM) dalam serangkaian program pendidikan dan pelatihan di seluruh aspek operasional baik terkait pelayanan, produk, manajerial maupun tata kelola perusahaan.
2. Rencana bisnis dan anggaran telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal disamping berdasarkan pencapaian historis tahun- tahun sebelumnya, dengan menggunakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
3. Rencana bisnis dan anggaran telah dijadikan acuan bagi Direksi dalam mengelola perusahaan agar target-target bisnis dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan.
4. Direksi telah memastikan penerapan tata kelola dan kepatuhan dapat dilaksanakan oleh seluruh bagian, dengan menetapkan kebijakan struktur organisasi dan job desk secara jelas dan tegas pada masing-masing bagian.
5. Secara berkala Direksi telah melakukan review dan evaluasi pedoman kebijakan dan prosedur sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan serta perundang- undangan yang berlaku kini.
6. Direksi telah memastikan adanya due control terkait pelaksanaan KWC dan penilaian risiko berdasarkan profil nasabah melalui CDD maupun EDD, berikut terkait penerapan APU-PPT dan PPPSPM.
7. Upaya penanganan kredit bermasalah telah dan terus dilakukan, baik melalui upaya penagihan secara continue, restrukturisasi kredit, penjualan aset/ agunan maupun penyempurnaan sistem analisa kredit berbasis scoring untuk menekan timbulnya kredit bermasalah baru.
8. Direksi telah membentuk tim task force untuk kesiapan implementasi SAKEP tahun 2025,

dan berkoordinasi dengan vendor atas kesiapan CBS dalam melakukan pencatatan transaksi berdasarkan ketentuan SAK EP.

9. Secara berkala Direksi melakukan evaluasi kinerja bank terhadap target RBB yang ditetapkan berikut penetapan kebijakan yang akan diambil sebagai upaya pemenuhan target RBB, seperti Kebijakan promo Kredit Mitra Makmur bagi UMKM, Kredit Go To School, Tabris dll.

Anggota Direksi telah sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya jumlah anggota Direksi 2 orang, Direksi juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja dan sudah memastikan penerapan tata kelola di semua bagian termasuk menetapkan struktur organisasi.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Novyanti Indah
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan POJK, Peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. e. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan. 	
2.	Nama	Susanto
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan POJK, Peraturan perundangundangan, anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Melakukan pengawasan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. e. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan. 	

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran BPR hendaknya dapat di susun berdasarkan kondisi dan kemampuan BPR dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Rencana bisnis dan anggaran BPR hendaknya dapat digunakan sebagai

pedoman atau acuan bagi Direksi dan seluruh staff pegawai dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR.

b. Optimalisasi upaya penyelesaian kredit bermasalah.

c. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses penyaluran kredit baru maupun existing melalui assessment terhadap kemampuan calon debitur, tujuan penggunaan kredit, nilai agunan yang di berikan hingga perikatan agunan yang memadai sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM secara berkelanjutan dengan mengikut sertakan karyawan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.

e. Meningkatkan penerapan Tata Kelola BPR disetiap bagian dan menjadikan Budaya Kepatuhan serta penerapan Manajemen Risiko sebagai kebutuhan dalam pelaksan kegiatan operasional BPR.

f. Pengawasan penerapan APU-PPT dan PPPSPM tetap dilakukan secara konsisten agar Bank terhindar dari transaksi TPPU, TPPT maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Jumlah Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu 2 (dua) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris BPR Alto Makmur telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Kusmintarjo Yatendro
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Jupaidi
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

	Nama	Novyanti Indah
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
2.	Nama	Susanto
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR Alto Makmur. Namun demikian di dalam kepengurusan Dewan Komisaris hanya Ibu Novyanti Indah yang dalam kedudukannya selain sebagai Komisaris Utama juga sebagai Pemegang Saham BPR Alto Makmur, dengan kepemilikan saham sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau 20,00%.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Kusmintarjo Yatendro
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Jupaidi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Novyanti Indah
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Susanto
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham

Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR Alto Makmur tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR lain.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Kusmintarjo Yatendro
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Jupaidi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Novyanti Indah
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Susanto
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR Alto Makmur tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR



	Nama	Kusmintarjo Yatendro
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Jupaidi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Novyanti Indah
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Susanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Masing- masing Anggota Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham lainnya dan Masing- masing Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham lainnya.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Kusmintarjo Yatendro
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Jupaidi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Novyanti Indah
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Susanto

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Masing- masing Anggota Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham lainnya dan Masing- masing Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham lainnya.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp457.733.760
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp249.498.048

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp321.947.192
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp113.279.340

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
---------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp44.240.394
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp15.484.138

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp105.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp45.000.000

Fasilitas lain bagi Pengurus ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 02/ RUPS/ BPR.AM/ III/2023 Agenda Rapat Ketiga menyetujui dan menetapkan besaran Remunerasi dan fasilitas lain bagi Pengurus. Fasilitas lain bagi

Direksi dan Dewan Komisaris adalah: Unit Mobil Operasional Toyota Innova Reborn Tahun 2021 untuk Direktur Utama; Unit Mobil Operasional Toyota Avanza G Tahun 2022 untuk Direktur. Asuransi Purna Tugas untuk 2 Orang Direksi sebesar Rp. 105.000.000,- dan 2 Orang Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp. 45.000.000,-. RUPS No. 01/RUPS/BPR.AM/IV/2024 Agenda Rapat Ketiga menyetujui dan menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lain bagi Pengurus Tetap dan/atau sama dengan tahun sebelumnya (2023).

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,26 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,24 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,14 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,22 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	4,20 : 1
-------------	----------

Besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan putusan RUPS, sedangkan besaran gaji bagi staf pegawai ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 68/SK-DIR/BPR.AM/III/2023 tentang Pedoman Kebijakan Standar Gaji dan Tunjangan Pegawai.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	23 Januari 2024
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan NPL, PPAP dan BMPK
2. pembahasan debitor restrukturisasi dan non restrukturisasi
3. Pembahasan data nasabah baru dalam rangka penerapan APU PPT dan PPSPM serta pengawasan aktif Dekom terkait penerapan APU PPT dan PPSPM
4. Pembahasan kinerja BPR, evaluasi pencapaian target berdasarkan rencana bisnis

	2023	
2.	Tanggal Rapat	06 Maret 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan pemantauan limit pada enam risiko 2. Pembahasan NPL, PPAP dan BMPK 3. Pembahasan data nasabah baru dalam rangka penerapan APU PPT dan PPSPM serta pengawasan aktif Dekom terkait penerapan APU PPT dan PPSPM 4. Pembahasan kinerja BPR, evaluasi pencapaian target berdasarkan rencana bisnis 2024 		
3.	Tanggal Rapat	06 Juni 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan pemantauan limit pada enam risiko 2. Pembahasan data nasabah baru dalam rangka penerapan APU PPT dan PPSPM serta pengawasan aktif Dekom terkait penerapan APU PPT dan PPSPM 3. Pembahasan kinerja BPR, evaluasi pencapaian target berdasarkan rencana bisnis 2024 4. Pembahasan revisi Rencana Bisnis BPR 		
4.	Tanggal Rapat	05 September 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan pemantauan limit pada enam risiko 2. Pembahasan data nasabah baru dalam rangka penerapan APU PPT, PPSPM dan judi online serta pengawasan aktif Dekom terkait penerapan APU PPT dan PPSPM 3. Pembahasan kinerja BPR, evaluasi pencapaian target berdasarkan rencana bisnis 2024 4. Pembahasan Standar Operasional dan Prosedur pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko 		
5.	Tanggal Rapat	04 Desember 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan pemantauan limit pada enam risiko 2. Pembahasan data nasabah baru dalam rangka penerapan APU PPT, PPSPM dan judi online serta pengawasan aktif Dekom terkait penerapan APU PPT dan PPSPM 3. Pembahasan kinerja BPR, evaluasi pencapaian target berdasarkan rencana bisnis 4. Pembahasan Rencana Bisnis BPR tahun 2025 5. Pembahasan Standar Operasional dan Prosedur Penerapan Tata kelola BPR (GCG) 		

Anggota Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 5 (Lima) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris rata-rata mencapai 100,00% dimana 3 kali dilakukan secara telekonferensi dan 2 kali dilaksanakan secara fisik.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Novyanti Indah
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	2 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	3 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Susanto
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	2 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	3 kali hadir

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan 5 kali dalam 1 periode tahun 2024, dengan kehadiran 100,00% baik yang dihadiri secara fisik maupun melalui telekonferensi.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Nihil

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Nihil

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	11 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perayaan Natal
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk perayaan Natal
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	01 Februari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Paud Terpadu Jabal Rahmah
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Sosial kepada Paud Terpadu Jabal Rahma
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	30 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Keluarga Alm Bpk Sandiyo
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan duka cita atas meninggalnya Bpk Sandiyo (orangtua karyawan)
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	04 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Posko Lebaran
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk Posko Lebaran 1445H
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	14 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Warga Pendowoharjo Sewon Bantul
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan hewan Qurban di Pendowoharjo Sewon Bantul
	Jumlah (Rp)	Rp3.700.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	01 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Desa Nanggulan
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk peringatan HUT RI ke 79 desa Nanggulan Depok Sleman
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	02 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Desa Sinduadi
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk peringatan HUT RI ke 79 desa Sinduadi Mlati Sleman
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	05 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Keluarga Alm Bpk Sartono
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan duka cita atas meninggalnya Bpk Sartono (orangtua karyawan)
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	07 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Desa Bintaos
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan air bersih di desa Bintaos Gunungkidul
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	08 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Desa Pendowoharjo
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk peringatan HUT RI ke 79 desa Pendowoharjo Bantul
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	23 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Keluarga karyawan an Mira Dian R
	Penjelasan Kegiatan	Hadiah kelahiran anak karyawan an Mira Dian R
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	11 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Desa Bintaos
	Penjelasan Kegiatan	Baksos air bersih dan sembako dalam rangka milad BPR Alto Makmur ke 31
	Jumlah (Rp)	Rp5.562.710
13.	Tanggal Pelaksanaan	10 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	GKJ Madukismo
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan sosial untuk Gereja Kristen Jawa Madukismo
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	22 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Keluarga Alm Bpk Sugeng
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan duka cita atas meninggalnya Bpk Sugeng (orangtua karyawan)
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	01 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Keluarga karyawan an Chandra
	Penjelasan Kegiatan	Hadiah kelahiran anak karyawan an Chandra
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	31 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SMP N 1 Tepus Gunungkidul
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan kegiatan HUT ke 50 SMP Negeri 1 Tepus Gunungkidul
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Alto Makmur merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Sumbangan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa sumbangan duka, pembagian sembako, sumbangan acara HUT peringatan hari kemerdekaan Indonesia, sedangkan sumbangan kegiatan sosial keagamaan berupa sumbangan perayaan natal di Gereja.

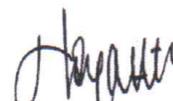
Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR ALTO MAKMUR untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sleman, 21 April 2025

PT. BPR ALTO MAKMUR



Kusmintarjo Yatendro, SE
Direktur Utama



Novyanti Indah, SH, MKn
Komisaris Utama